

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi Corona Virus Diseases atau yang disingkat dengan Covid- 19 belakangan ini membuat seluruh tatanan kehidupan sosial, dan ekonomimengalami perubahan yang cukup signifikan. Virus *Corona* (Covid-19) pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019. *Coronavirus* sendiri merupakan keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, virus ini dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flubiasa hingga penyakit yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* serta Sindrom Pernafasan Akut Berat/ *Severe AcuteRespiratory Syndrome (SARS)*. *Coronavirus* jenis baru yang ditemukan pada manusia kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2)*, dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease- 2019 (Covid-19)*.

Pandemi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Pandemi ini memaksa kita untuk beraktivitas di rumah, menjaga jarak, mengenakan masker saat berpergian, dan bahkan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya akibat pandemi ini. Pandemi ini membuat tingkat kemiskinan naik, di mana menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2019 presentase kemiskinan di Indonesia sebesar 9,22%, namun pada Maret 2020 naik menjadi 9,78% dan pengangguran di Indonesia melonjak, di mana tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2020 di Indonesia mencapai 9,77 juta orang atau mengalami

kenaikan dari 5,23% menjadi 7,07% dibandingkan dengan tahun lalu (BPS, 23/11/2020). Pada tahun 2020 angka kemiskinan di Kalimantan Selatan yaitu sebesar 4,38%. Sedangkan, angka kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sendiri yaitu sebesar 5,17% (Badan Pusat Statistik, 2021).

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi perekonomian ditingkat desa salah satunya adalah dengan pemanfaatan dana desa. Dana desa merupakan anggaran yang dapat di alokasikan secara langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak dari wabah ini di tingkat rumah tangga dan desa (Asmanto *et al.*, 2020). Beberapa dampak yang merugikan yaitu banyak pekerja yang di PHK, usaha-usaha yang terpaksa gulung tikar, penurunan penghasilan bagi para pedagang, ojek online, supir angkutan umum dan lain sebagainya. Dana desa merupakan alokasi anggaran on budget yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa. Untuk membantu masyarakat agar tetap dapat hidup dengan layak ditengah pandemi ini, pemerintah melalui Kementerian Sosial (selanjutnya ditulis Kemensos) mencanangkan program Bantuan Sosial Tunai (selanjutnya ditulis dengan BST) kepada masyarakat yang terdampak wabah Covid-19 ini. Bantuan tersebut senilai 600.000 rupiah / kepala keluarga (selanjutnya ditulis KK) pada Gelombang 1 (April-Juni 2020) dan sebesar 300.000 rupiah pada gelombang 2 (Juli-Desember 2020) (Ferdian Pratama, Puspensos 21/5/2020).

Tujuan dilaksanakannya program tersebut adalah untuk menjaga daya beli masyarakat di masa pandemi ini. Namun, kehadiran program tersebut menuai banyak problematika. Seperti tidak tepatnya sasaran penerima bantuan, pemangkasan uang BST secara sepihak, menciptakan peluang korupsi, dan

menimbulkan konflik sosial serta uang bantuan yang tidak dipakai dengan baik oleh masyarakat. Fenomena yang terjadi, BST tersebut diberikan kepada masyarakat yang tidak sesuai kriteria yang telah ditetapkan, sehingga masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan tersebut tetap hidup dalam kekurangan. Perilaku tidak adil dalam pembagian BST yang terjadi saat ini, dapat menimbulkan konflik antar masyarakat dan memunculkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya. Selain itu, fenomena yang terjadi banyak juga masyarakat penerima bantuan yang menggunakan uang tersebut untuk hal-hal yang tidak diperlukan, seperti pada saat lebaran kemarin, banyak dari masyarakat yang menggunakan uang bantuan ini untuk membeli baju lebaran, kue lebaran, dan lain-lain. Fenomena tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan dalam segi ekonomi bagi mereka yang membutuhkan serta menimbulkan konflik sosial antar masyarakat. Padahal tujuan program BST yang diberikan semasa pandemi ini, diharapkan dapat membantu masyarakat untuk hidup dengan layak ditengah ketidakstabilan ekonomi yang terjadi.

Pemberian dana BST ini diberikan oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat yang terdampak wabah Covid-19 ini. Termasuk di Desa Pandulangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dimana pada masa pandemi ini angka pengangguran di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada bulan Agustus 2020 mencapai 2.903 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2021). Dengan tingkat pengangguran serta kemiskinan yang melonjak, maka pemerintah melalui Kemensos memberikan bantuan tersebut kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Pandulangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di Desa Pandulangan banyak sekali masyarakat yang mengalami dampak dari adanya wabah Covid-19 dan banyak dari mereka

juga mendapatkan bantuan tersebut. Dampak yang terjadi di Desa Pandulangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan seperti banyak dari masyarakat yang mengalami kasus Pemutusan Hubungan Kerja, penurunan jam kerja, bahkan selama masa pandemic ini, bagi mereka yang berwirausaha mengalami penurunan pendapatan pula, sehingga mereka terpaksa untuk menutup sementara usaha mereka. Pemberian BST pada masa pandemi ini banyak terjadi hambatan dan pertanyaan. Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti secara lebih dalam tentang “Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai pada masa Pandemi Covid-19 bagi masyarakat miskin studi pada Desa Pandulangan Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi dari program bantuan sosial tunai pada masa covid-19 di Desa Pandulangan Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Bagaimana manfaat penerima bantuan dari program bantuan sosial tunai pada masa covid-19 di Desa Pandulangan Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dan manfaat program Bantuan Sosial Tunai pada masa Pandemi Covid-19 bagi masyarakat miskin di Desa Pandulangan Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi sumber informasi bagi pembaca mengenai implementasi program Bantuan Sosial Tunai bagi masyarakat miskin pada masa pandemi Covid-19.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi saran dan masukan bagi orang-orang yang tertarik mengetahui lebih lanjut mengenai implementasi pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai bagi masyarakat miskin pada masa pandemi covid-19.

